

PERSEPSI GURU BAHASA INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN MEDEKA BELAJAR DI KECAMATAN BOJONEGARA

Eka Nurul Mualimah¹, DC Aryadi²

Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Email : eka88nurul@gmail.com

ABSTRAKSI

Pengimplementasiannya, kebijakan merdeka belajar memiliki efek positif dan negatif yang mewarnai dunia pendidikan. Hal ini menimbulkan banyak sikap, reaksi dan pendapat di kalangan para Guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi Guru tentang implementasi kebijakan merdeka di Kecamatan Bojonegara. Peneliti menggunakan penelitian berjenis deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara guna mengetahui (ungkapan) tertulis atau lisan yang berkaitan dengan persepsi Guru bahasa Indonesia tentang kebijakan belajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Guru tentang implementasi kebijakan merdeka belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu positif. Hal ini tercermin pada kesediaan mengikuti kebijakan tersebut, untuk kemajuan sistem pendidikan di Indonesia dengan upaya mengikuti pelatihan, *workshop*, serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan.

Kata Kunci: Persepsi Guru, Kebijakan Merdeka Belajar.

ABSTRACT

In its implementation, the independent learning policy has positive and negative effects that color the world of education. This gave rise to many attitudes, reactions and opinions among Masters. This study aims to describe teachers' perceptions of the implementation of the independence policy in Bojonegara District. The researcher used a qualitative description type research with observation and interview data collection techniques to find out written or oral (expressions) related to the Indonesian teacher's perceptions of learning policies. The results of this study indicate that the teacher's perception of the implementation of the independent learning policy in learning Indonesian is positive. This is reflected in the willingness to follow the policy, for the advancement of the education system in Indonesia by participating in training, workshops, and creating a fun learning atmosphere.

Keywords: Teacher's Perception, Independent Learning Policy.

Penulis Korespondensi

Eka Nurul Mualimah

Tanggal Submit : 28/07/2023
Tanggal Diterima : 21/08/2023
Tanggal Terbit : 15/12/2023

This is an open access article under the [CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Publisher's Note: JPPM stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

I. PENDAHULUAN

Merdeka Belajar Usulan Nadiem bertujuan menata ulang sistem pendidikan untuk mengakomodasi perubahan dan kemajuan bangsa. Internet dan teknologi telah mendorong pembelajaran mandiri, dengan demikian lembaga pendidikan, Guru, dan Siswa dapat menikmati kebebasan berinovasi, belajar dengan mandiri, dan berkreasi. Guru memainkan peran strategis dalam pelaksanaan dan keberhasilan strategi kebijakan merdeka belajar. Guru berperan penting dalam kebijakan merdeka belajar, karena dalam kebijakan tersebut Guru diberi keleluasaan dalam mengembangkan kemampuan Peserta Didik dengan caranya sendiri. Pada pengimplementasiannya, kebijakan merdeka belajar memiliki efek positif dan negatif yang mewarnai dunia pendidikan. Hal ini menimbulkan banyak sikap, reaksi dan pendapat di kalangan para Guru. Karena setiap perbaikan kebijakan mengubah pendekatan pembelajaran yang digunakan, serta munculnya hambatan dalam pelaksanaan sehingga banyak penyesuaian yang diperlukan. Objek penelitian ini yaitu persepsi Guru yang terbentuk atas dasar pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. Pengalaman tersebut terangkum dalam pendapat setiap Guru yang merasakannya mengenai implementasi kebijakan merdeka belajar khususnya di dalam penerapan pelajaran bahasa Indonesia yang di mana menjadi pelajaran dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi.

Kebijakan mandiri belajar merupakan hasil diskusi intensif antara Kemendikbud, pejabat pendidikan dan tim internal yang mengajak lembaga pendidikan untuk berinovasi secara mandiri dengan menyikapi empat poin kebijakan yaitu USBN Mandiri, Ujian Nasional menjadi Penilaian Nasional, penyederhanaan peraturan zonasi RPP dan PPDB. Penyelenggaraan ujian sekolah yang semula berstandar nasional, kini telah digantikan oleh penyelenggaraan ujian sekolah mandiri yang dikenal dengan USBN Mandiri, dimana sekolah diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan ujian tersebut. Dengan demikian, pendidik dan sekolah lebih mandiri dalam melakukan penilaian Siswa. Penyelenggaraan ujian nasional (UN) telah digantikan dengan penilaian nasional. Implementasi untuk mendorong mutu sekolah untuk penilaian. Selain itu, peraturan baru akan menggunakan pengaturan tempat tinggal siswa yang terstruktur dan ditargetkan sesuai dengan kebutuhan lokal, karena berbeda dalam aksesibilitas dan kualitas. Dengan demikian, masyarakat di kawasan zonasi dapat bersekolah di sekolah yang disponsori oleh zonasi.

Sekolah sebagai wadah dari kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh Pemerintah, oleh sebabnya sekolah menjadi awal mula penerapan kebijakan. Peserta didik menjadi acuan Guru dalam penentuan keberhasilan kebijakan, serta sebagai bahan evaluasi Guru untuk meningkatkan serta mengembangkan inovasinya. Setuju ataupun tidak, Sekolah dan Guru harus siap dalam menerima kebijakan yang terus dikembangkan, mau bagaimana pun hal tersebut menjadi tolok ukur kemajuan sistem pendidikan di Indonesia

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Oki Suhartono (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19 menunjukkan hasil ancaman dan kelemahan masih mendominasi kekuatan dan peluang yang ada, ketersediaan SDM, sarana teknologi informasi dan dukungan pemerintah yang berwenang masih dibenturkan dengan realitas lapangan di masyarakat yang masih gagap dalam menguasai teknologi serta keterbatasan anggaran dalam mengelola dan mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di masa pandemi covid-19.

Perdana (2021) meneliti “Persepsi Guru terhadap Kebebasan Belajar Dikaitkan dengan Penyederhanaan RPP”. Kajian ini menyimpulkan bahwa kesadaran Guru terhadap kebijakan belajar mandiri berkaitan dengan penyederhanaan RPP dan pengembangan RPP. Kendala penyederhanaan RPP adalah kebingungan Guru dalam menyederhanakan 13 komponen dan kesulitan Guru dalam menggunakan RPP versi mana. Solusi untuk mengatasi rintangan ini datang dari para Guru yang membentuk departemen untuk melakukan *brainstorming* bagaimana menyusun 13 bagian menjadi rencana pelajaran tiga bagian. Selain itu, Wakil Direktur Madrasah melakukan sosialisasi mingguan untuk menyelidiki lebih lanjut pembuatan RPP.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Widyastuti (2020) dengan judul “Persepsi Guru terhadap konsep kebebasan belajar oleh Mendikbud Nadiem Makarim dalam pelajaran tematik di SD Negeri 140 Seluma”. Berikut hasil survei tersebut: 1) Wali kelas SDN 140 Seluma bersikap positif terhadap konsep belajar mandiri dengan Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bersedia mengikuti pedoman yang ada. 2) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan konsep belajar mandiri oleh Mendikbud Nadiem Makarim akan dilakukan secara bertahap seperti melakukan seminar, pembinaan pengawas dan pimpinan pendidikan, serta peningkatan kualifikasi Guru.

III. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bojonegara dengan melakukan observasi awal seperti pengamatan tempat pengkajian pengumpulan data beberapa Sekolah yang ada di Kecamatan Bojonegara. Penelitian berjenis deskripsi kualitatif ini dilakukan guna mengetahui (ungkapan) tertulis atau lisan yang berkaitan dengan persepsi Guru Bahasa

Indonesia yang ada di Kecamatan Bojonegara tentang merdeka belajar. Data bersumber dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa Guru bahasa Indonesia yang ada di beberapa Sekolah baik tingkan SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA yang ada di Kecamatan Bojonegara. Observasi dilakukan dengan mengamati penerapan kebijakan merdeka belajar dari beberapa sekolah, sedangkan wawancara dilakukan untuk mengambil data persepsi Guru tentang kebijakan merdeka belajar terkait pelaksanaan AN, sistem zonasi, serta pelaksanaan USBN mandiri pelajaran bahasa Indonesia. Data observasi dan wawancara yang diperoleh selanjutnya dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk meringkas semua data kemudian memilih unsur-unsur pokok berhubungan dengan judul penelitian, Peneliti mengolah data sehingga terjadi sinkron dengan tujuan penelitian serta menarik kesimpulan dari data yang sudah dianalisis dengan melakukan kevalidan dan verifikasi data pada Guru bahasa Indonesia agar kesimpulan tersebut tidak bersifat sementara.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Kebijakan merdeka belajar mencakup empat pokok kebijakan, yaitu USBN mandiri, UN diganti AN, RPP satu lembar, peraturan PPDB zonasi. Dalam pembahasan ini 4 poin kebijakan merdeka belajar dipaparkan untuk mengumpulkan informasi dari Guru dengan mendeskripsikan dalam bentuk narasi dari sebuah pengalaman terhadap pengimplementasian kebijakan merdeka belajar yang membentuk persepsi atau pandangan.

“Menurut Saya, baguslah baik. Karena pada dasarnya kebijakan merdeka belajar merupakan isi daripada Guru mengatur, mengarahkan, dan membimbing bukan hanya tentang pembelajaran Siswa tetapi arah hidup Siswa seperti motivasi, dan lain sebagainya. Karena yang disebut merdeka itu bebas berekspresi jadi tidak ada batasan, kita mampu pula menjadi seorang Guru, Orang tua. Seperti itu untuk merdeka belajar, kalau menurut Saya.”
(Ibu Ermayati, wawancara 18 Juli)

Temuan penelitian yang dibuktikan dari hasil wawancara tentang implementasi kebijakan merdeka belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia memiliki persepsi positif. Pengimplementasian kebijakan merdeka belajar di beberapa Sekolah di Kecamatan Bojonegara dijalankan sesuai dengan aturan Kemendikbud, seperti pelaksanaan USBN yang semula pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Pusat tetapi dengan adanya USBN mandiri sekolah yang mengatur pelaksanaannya serta mempunyai kewenangan dan untuk jenis soalnya berbentuk *online* tidak lagi berbentuk fisik secara manual, hal tersebut sejalan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini.

“Pelaksanaan USBN mandiri ini baik, karena diharuskan dan pelaksanaannya diatur oleh sekolah masing-masing. Jadi, sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur setiap pelaksanaan ujian sekolah itu, dan bagaimana pelaksanaannya, yaitu dengan mengatur cara pengorganisasiannya, baik dari struktur pelaksanaannya sampai ke pembiayaannya.” (Ibu Nurhayati, wawancara 19 Juli)

Pelaksanaan UN yang diganti dengan AN, Guru bahasa Indonesia setuju karena dengan digantinya UN menjadi AN kelulusan Siswa tidak terpacu pada nilai akhir. Adapun hasil dari AN, untuk mengevaluasi perbaikan. Pelaksanaan AN diselenggarakan media komputer, bukan dalam bentuk tes kertas yang dikenal dengan sebutan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer.

“Kurang tepat, karena tadi zonasi itu hanya merekrut Siswa yang jarak antara rumah dengan sekolah itu dekat, selain itu hanya diambil dari prestasi. Sedangkan, Orang yang ingin melanjutkan terhadap sekolah yang dituju kalau dengan jarak tidak bisa. Jadi ya kurang efektif dan sangat berdampak pada pembelajaran bahasa Indonesia.”
(Ibu Ratnasari, wawancara 18 Juli 2023)

Peraturan PPDB zonasi hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya pengaruh atau dampak dalam pembelajaran bahasa Indonesia, karena efek zonasi tidak semua kemampuan Siswa sama akan tetapi adanya PPDB ini bagus untuk pemerataan Siswa yang akan melanjutkan sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Guru adalah penentu keberhasilan implementasi kebijakan merdeka belajar, karena kemampuan profesional Guru dirancang guna menghadapi berbagai tantangan atas kemajuan zaman sehingga menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menyongsong perkembangan-perkembangan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang semakin efektif guna meningkatkan kualitas pendidikan

V. KESIMPULAN

Persepsi Guru tentang implementasi kebijakan merdeka belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu positif. Hal ini tercermin pada kesediaan mengikuti kebijakan tersebut, untuk kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Persepsi Guru sebagai kunci utama pelaksanaan kebijakan merdeka belajar, yang dalam pandangannya tentu tidak akan sama, sehingga setiap Guru dapat mengemukakan pendapatnya atau menanggapi sesuai perasaannya, baik setuju maupun tidak. Atas perbedaan persepsi yang diperoleh dari pengimplementasian kebijakan merdeka belajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini berjalan dengan lancar dengan bantuan beberapa pihak. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada

1. Rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
2. Pusat LPPM Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
3. Guru Bahasa Indonesia SMA N 1 Bojonegara
4. Guru Bahasa Indonesia SMK N 1 Bojonegara
5. Guru Bahasa Indonesia MA Nurul Hidayah
6. Guru Bahasa Indonesia SMP N 1 Bojonegara
7. Guru Bahasa Indonesia SMP N 2 Bojonegara

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oki Suhartono, "Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19". Uin-Malang, pp 88-19. 2022.
- [2] Mustari, M. Manajemen Pendidikan Di Era Merdeka Belajar : Epiode 1-10. Jakarta : Kemendikbudristek. 2021
- [3] Perdana, "Persepsi Guru terhadap Kebebasan Belajar Dikaitkan dengan Penyederhanaan RPP". Universitas Negeri Jogjakarta. 2021
- [4] Satyawati, T.S., dkk Meninggal Kemampuan Implementasi Merdeka Belajar Melalui Seminar Online Bagi Guru dan Kepala Sekolah. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6 (2), 353-363. 2022
- [5] Widyaastutu, "Persepsi Guru terhadap konsep kebebasan belajar oleh Mendikbud Nadiem Makarim dalam pelajaran tematik di SD Negeri 140 Seluma", Universitas Islam Indonesia. 2020.